

Abstrak

Indonesia merupakan salah satu negara penghasil minyak bumi dan gas terbesar di Asia Tenggara. Namun, saat ini kemampuan produksi minyak bumi dan gas Indonesia terus mengalami penurunan sehingga saat ini bisnis hulu migas Indonesia tidak lebih baik dari Malaysia meskipun sama-sama menggunakan sistem kontrak bagi hasil. Perlu optimalisasi dalam skema kontrak bagi hasil Indonesia untuk meningkatkan produksi migas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kelebihan, kelemahan, persamaan, dan perbedaan implementasi kontrak bagi hasil minyak bumi dan gas di Indonesia dan Malaysia serta memberikan alternatif kebijakan terkait implementasi kontrak bagi hasil minyak bumi dan gas di Indonesia agar penerimaan negara lebih optimal. Penerimaan negara dalam penelitian ini merujuk pada bagi hasil yang diterima pemerintah Indonesia dalam kontrak bagi hasil. Analisis dilakukan secara deskriptif dengan pendekatan studi kasus untuk melakukan perbandingan antara PSC yang berlaku di Indonesia dan di Malaysia. Penelitian ini menunjukkan bahwa perbedaan antara PSC Indonesia dan Malaysia terletak pada karakteristik kontrak bagi hasil di mana kontrak bagi hasil Indonesia bersifat umum sedangkan kontrak bagi hasil Malaysia dibedakan berdasarkan karakteristik wilayah kerja. Selain itu, perbedaan lain terletak pada tarif royalti, perlakuan batasan pengembalian biaya operasional, persentase bagi hasil, dan penerimaan negara yang diperoleh pemerintah. Sedangkan perbedaan pada PSC dengan mekanisme Gross Split Indonesia dan Malaysia terletak pada pengenaan royalti, dan penetapan persentase bagi hasil. Dengan demikian, penulis menyarankan pemerintah untuk menetapkan aturan kontrak bagi hasil yang lebih spesifik sesuai dengan wilayah kerja yang ditawarkan dalam lelang.

Kata Kunci: Kontrak Bagi Hasil, Hulu Migas, Pengembalian Biaya Operasional, Gross Split.

Abstract

Indonesia is one of the biggest oil and gas producer in the Southeast Asia. Yet, the decline of Indonesian oil and gas production capability making them lagging from Malaysia even though both use similar production sharing contract (PSC) system on their petroleum fiscal system. PSC optimalization is needed to increase Indonesia oil and gas production. This research aims to analyse advantages, disadvantages, similarities, and differences of Indonesia and Malaysia PSC and provide policy alternatives related to Indonesian PSC to optimize government revenue. Government revenue in this research refers to government entitlement in the profit sharing of PSC. The result of the study case method shows that the differences between Indonesia and Malaysia PSC lies in the characteristic. Other differences also shown on royalty tariff, cost recovery limit treatment, profit sharing percentage, and revenue acquired by government. Subsequently, the differences on PSC with gross profit mechanism lies on royalty imposition, treatment of cost recovery limit, and determination of profit share percentage. Therefore, the author recommends the Government of Indonesia to issue PSC regulation based on characterization of working area offered on auction.

Keywords: Production Sharing Contract, Upstream Oil and Gas, Cost Recovery, Gross Split.